



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Suradireja No. 28 Telp./Fax. (0264) 200221-Purwakarta 41115

website : [Http//www.diskanak.purwakarta.go.id](http://www.diskanak.purwakarta.go.id)

e-mail : [diskanak.Purwakarta@gmail.com](mailto:diskanak.Purwakarta@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM  
NIP : 196806281993032007  
Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERANAKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

**MENUGASKAN**

Kepada nama-nama tersebut dibawah ini :

Nama : ASEP BUDI SANTOSO, S.Pt  
NIP / Gol. Ruang : 19770101 200604 1025/III.d  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Sub Subtansi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk : Mengikuti evaluasi atas tindak lanjut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di Aula Inspektorat Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**Kepala Dinas**  
**Perikanan dan Peteranakan**  
**Kabupaten Purwakarta**

  
Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM  
NIP. 196806281993032007



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 16 Januari 2025

Nomor : 700.1/76/Inspektorat/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. Seluruh Kepala OPD dan Camat  
Di  
Tempat

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/222/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya :

1. Memastikan evaluasi internal pada tahun berjalan telah dilaksanakan sehingga kualitas evaluasi internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat diukur kualitasnya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.
2. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan menyampaikan kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Oleh karena kami bermaksud menyelenggarakan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Januari 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Untuk kelancaran acara tersebut, Kepala OPD dan Camat agar menugaskan Fungsional Perencanaan / Kasubag Program dan keuangan untuk hadir pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Pt. Inspektur Inspektorat Daerah  
Kabupaten Purwakarta

Dan Abdurahman, SH, MH  
Nip. 19710713 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada, :

1. Yth. P.J. Bupati Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Perangkat Daerah	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Ket.
				S	DP	B	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	-	-	4	
2	RSUD Bayu Asih	1	1	-	-	1	
3	Inspektorat	1	1	1			
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	4	-		
5	Disporaparbud	4	5	-	-	5	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	5	-	-	5	
7	Dinas Perhubungan	1	1	-	-	1	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	8	4	-	4	
9	Badan Pendapatan Daerah	1	2	-	-	2	
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	7	-	-	7	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	4	4			
12	Sekretariat Daerah	4	5	-	-	5	
13	Dinas Pendidikan	3	2	-	-	2	
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6	5	-	-	5	
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	-	-	4	
16	Sekretariat DPRD	4	4	-	-	4	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	4	4	-	-	
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	-	-	1	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	3	-	2	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	5	-	-	5	
21	Dinas Koperasi	1	4	3	-	1	
22	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	4			

23	Kec. Pondoksalam	6	6	6	-	-
24	Kec. Kiarapedes	6	4	-	-	4
25	Kec. Pasawahan	4	5	5	-	-
26	Kec. Bojong	2	2	2	-	-
27	Kec. Wanayasa	4	5	-	-	5
28	Kec. Bungursari	4	4	-	-	4
29	Kec. Campaka	4	4	4	-	-
30	Kec. Jatiluhur	5	1	1	-	-
31	Kec. Purwakarta	4	4	4	-	-
32	Kec. Sukatani	4	5	4	-	-
33	Kec. Plered	11	11	-	-	11
34	Kec. Tegalwaru	3	3	-	-	3
35	Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi	1	2	-	-	2
36	Dinas Arsip	1	3	-	-	3
37	Dinas Kesehatan	3	3	-	-	3
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	1	4	-	-
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	4	-	-
40	Dinas Peternakan dan Perikanan	4	4	-	-	4
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	-	-	4
42	Dinas Pangan dan Pertanian	4	4	-	-	4
43	Kec. Maniis	6	13	12	-	1
44	Kec. Darangdan	2	3	-	-	3
45	Kec. Sukasari	4	4	-	-	4
46	Kec. Cibatu	4	4	-	-	4
47	Kec. Babakan Cikao	4	4	4	-	-

Nomor : B/3/AA.03/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : **Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2024**

21 Juni 2024

Yth.

**Sekretaris Daerah (Terlampir)**

di

Tempat

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi atas perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi ini dimulai pada tanggal 28 Mei s/d 31 Juli 2024 dengan menggunakan 2 (dua) metode evaluasi, yaitu: *Desk Evaluation* dan *In-Depth Interview*. Terlampir Daftar Instansi Pemerintah berikut jadwal dan metode evaluasinya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami mengharapkan agar Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat membantu untuk melakukan koordinasi kegiatan evaluasi SAKIP dimaksud, antara lain berupa:

1. Penyediaan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB;
2. Pengumpulan dan penyampaian data yang diperlukan kepada Tim Evaluator Kementerian PANRB;
3. Melakukan koordinasi untuk tindak lanjut hasil-hasil evaluasi agar dapat dicapai perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan

Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Sdri. Ulva Presy (+62 858-6627-2878) atau Sely Kurniawan (0822 2810 6479).

Dalam rangka penegakan integritas, dimohon agar tidak ada pemberian gratifikasi kepada Tim Evaluator dalam bentuk apapun. Sekiranya ada pemberian gratifikasi akan kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240619CNTN





Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ERWAN AGUS PURWANTO**

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
NIP. 196808021998031001

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240619CNTN



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Lampiran I

Nomor : B/3/AA.03/2024

Tanggal : 21 Juni 2024

**DAFTAR PENERIMA SURAT**

No	Instansi Pemerintah
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.	Pemerintah Kabupaten Majalengka
3.	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4.	Pemerintah Kota Bandung
5.	Pemerintah Kota Bogor
6.	Pemerintah Kota Sukabumi
7.	Pemerintah Kota Banjar
8.	Pemerintah Kabupaten Pangandaran
9.	Pemerintah Kabupaten Cianjur
10.	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
11.	Pemerintah Kabupaten Nias Barat
12.	Pemerintah Kabupaten Nias Utara
13.	Pemerintah Kabupaten Bogor
14.	Pemerintah Kabupaten Bekasi
15.	Pemerintah Kabupaten Karawang
16.	Pemerintah Kabupaten Subang
17.	Pemerintah Kabupaten Bandung
18.	Pemerintah Kabupaten Garut
19.	Pemerintah Kabupaten Ciamis
20.	Pemerintah Kota Depok
21.	Pemerintah Kota Cimahi
22.	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
23.	Pemerintah Kabupaten Sumedang
24.	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
25.	Pemerintah Kabupaten Cirebon
26.	Pemerintah Kabupaten Kuningan
27.	Pemerintah Kabupaten Indramayu
28.	Pemerintah Kota Cirebon
29.	Pemerintah Kota Bekasi
30.	Pemerintah Kota Tasikmalaya
31.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi

**Lampiran I**

**Nomor : B/ 3 / AA.03/2024**

**Tanggal : 21 Juni 2024**

**JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

**A. IN-DEPTH INTERVIEW :**

No	Instansi Pemerintah	Hari, tanggal	Keterangan
1)	Kota Bogor	Rabu, 3 Juli 2024	Link Zoom dan informasi tambahan akan segera diinformasikan kemudian
2)	Kabupaten Bandung Barat		
3)	Kabupaten Ciamis	Kamis, 4 Juli 2024	
4)	Kota Cirebon		
5)	Kabupaten Sumedang	Senin, 8 Juli 2024	
6)	Kabupaten Subang		
7)	Kabupaten Bogor	Selasa, 9 Juli 2024	
8)	Kota Banjar		
9)	Provinsi Jawa Barat	Kamis, 11 Juli 2024	

\*Apabila terdapat perubahan dikemudian hari akan diinformasikan melalui PIC masing masing kabupaten/kota

**SUSUNAN PELAKSANAAN IN-DEPTH INTERVIEW**

Durasi	Rincian Kegiatan	Keterangan
<b>5 Menit</b>	Persiapan Teknis dan Pembukaan	
<b>30 Menit</b>	Pemaparan SAKIP level Instansi dan Unit Kerja (Perbaikan SAKIP secara umum)	Dilakukan oleh pimpinan instansi/Unit kerja
<b>70 Menit</b>	Diskusi dan Tanya Jawab	
<b>5 Menit</b>	Penyampaian kesimpulan dan hasil sementara	

**KETENTUAN EVALUASI MELALUI IN DEPTH INTERVIEW :**

1. Penentuan sampel OPD yang akan melakukan presentasi (3 sampai 4 OPD) merupakan OPD yang menjadi core business, OPD yang terlibat langsung dalam menangani isu utama yang ada di daerah atau OPD yang dipilih secara random/acak oleh evaluator
2. Inspektorat, Bappeda, dan Organisasi sebagai koordinator instansi dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP wajib mengikuti kegiatan In-Depth Interview sesuai jadwal yang telah ditentukan, meskipun tidak menjadi OPD sampel evaluasi;
3. Instansi dan unit kerja menyiapkan materi paparan berupa power point dengan informasi yang perlu ditampilkan sebagai berikut:
  - a. Tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya;
  - b. Progres implementasi SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal).
4. Batas waktu paparan untuk level Pusat (Pemerintah Daerah) maksimal 20 menit dan untuk unit kerja/Perangkat Daerah maksimal 10 menit, selanjutnya akan dilakukan pendalama oleh tim evaluator;
5. Materi paparan disampaikan maksimal 30 Juni 2024 melalui link: [bit.ly/LinkPaparansAKIP2024](https://bit.ly/LinkPaparansAKIP2024)

6. Peserta hanya mengikuti evaluasi sesuai jadwal masing-masing;
7. Peserta diwajibkan mengubah username/nama akun zoom dengan format “Instansi\_Unit Kerja\_Nama” contoh “Prov Jawa Barat\_Disdukcapil\_Aryo”. Apabila nama akun zoom tidak sesuai, maka tidak kami masukkan dalam Zoom Meeting;
8. Maksimal hanya 30 akun zoom untuk masing-masing instansi yang dipersilahkan masuk ke Zoom Meeting;
9. Peserta diharapkan mempersiapkan kelengkapan (akun Zoom, laptop/komputer dan kelengkapan lainnya yang diperlukan), memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan adalah jaringan yang paling stabil;
10. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai;
11. Peserta diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon sebelum dipersilakan oleh evaluator dan menjaga kegiatan evaluasi berlangsung kondusif.

Jika ada kendala jaringan baik selama zoom meeting berlangsung maupun sebelum jadwal zoom meeting dilakukan, dimohon dapat segera menginformasikan hal tersebut kepada Sdri. Ulva Presy (+62 858-6627-2878) atau Sdr. Sely Kurniawan (0822 2810 6479).

## B. DESK EVALUATION

No	Instansi Pemerintah
1.	Kabupaten Bekasi
2.	Kabupaten Cianjur
3.	Kabupaten Cirebon
4.	Kabupaten Garut
5.	Kabupaten Indramayu
6.	Kabupaten Karawang
7.	Kabupaten Kuningan
8.	Kabupaten Majalengka
9.	Kabupaten Pangandaran
10.	Kabupaten Purwakarta
11.	Kabupaten Sukabumi
12.	Kabupaten Tasikmalaya
13.	Kota Bandung
14.	Kota Bekasi
15.	Kota Cimahi
16.	Kota Depok
17.	Kota Sukabumi
18.	Kota Tasikmalaya

### **KETENTUAN EVALUASI MELALUI *DESK EVALUATION* :**

1. Melengkapi dokumen perencanaan terbaru yang diunggah melalui e-Sakip Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id));
2. Memberikan akses dan manual penggunaan atas aplikasi manajemen kinerja kepada evaluator (jika ada);
3. Mengirimkan paparan progress implementasi SAKIP mencakup tingkat Instansi dan Perangkat Daerah (PD) melalui [bit.ly/LinkPaparansAKIP2024](https://bit.ly/LinkPaparansAKIP2024) maksimal tanggal 30 Juni 2024. Adapun informasi yang perlu disampaikan dalam paparan meliputi:
  - a. Tindaklanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya;
  - b. Progress perbaikan implementasi AKIP yang telah dilakukan (kondisi beforeafter);
  - c. Logical Framework (pohon kinerja), cascading, dan crosscutting;
  - d. Efektivitas penggunaan APBD;
  - e. Penjenjangan kinerja sampai ke level Eselon IV setiap perangkat daerah dan individu;
  - f. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
4. Evaluasi metode desk tidak dilakukan dengan zoom, namun melalui penelaahan dokumen dan bukti dukung lainnya yang telah disampaikan serta komunikasi langsung jika diperlukan klarifikasi.